

TAJUK RENCANA

Hari Penegakan Kedaulatan Negara

MOMENTUM Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta sampai saat ini masih menjadi perhatian khusus masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ini bisa dimaklumi, karena masih banyak warga DIY yang mengalami peristiwa heroik tersebut, bahkan banyak warga yang terlibat dan menjadi korban serangan Belanda.

Karena itu, tidak berlebihan bila Pemerintah DIY melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY selama bertahun-tahun berupaya keras agar Serangan Umum 1 Maret 1949 momentum tersebut menjadi 'hari istimewa. Hari bersejarah penegakan kedaulatan negara, Republik Indonesia. Upaya tersebut akhirnya direspon pemerintah pusat dengan lahirnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022. 1 Maret ditetapkan sebagai Hari Besar Nasional, Hari Penegakan Kedaulatan Negara (HPKN).

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi, penetapan 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional telah melalui proses panjang. Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY telah memulai usulan penetapan sejak tahun 2018. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 memang memiliki makna penting bagi penegakan dan pengakuan kedaulatan negara, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Momentum tersebut membuka mata dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan mampu memberikan perlakuan kepada Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah peristiwa nasional yang melibatkan berbagai komponen bangsa, rakyat biasa, pelajar, pejuang, kraton,

TNI, dan Kepolisian. Semua menjadi satu kesatuan untuk menunjukkan penegakan kedaulatan negara setelah proklamasi.

Setelah lahir Kepres Nomor 2 Tahun 2022, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan bahwa dalam bersyukur momentum ini hendaknya Semangat 1 Maret 1949 diaktualisasikan dalam konteks masa kini. Bahwa etos kejuangan itu perlu terus-menerus dihidupkan sebagai sumber kekuatan semangat kebangsaan.

"Satu hal yang sama sekali tak boleh berubah ialah jiwa dan semangat kita sebagai pejuang, yang menuntun konsistensi di arus global yang semakin kompleks dan dinamis ini," tandas Sri Sultan.

Gubernur mengajak seluruh komponen bangsa, untuk semakin memupuk semangat persatuan dan kesatuan, dengan ditetapkannya 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Menjadikan sejarah sebagai guru dalam berbangsa, dengan melibatkan setiap generasi, agar ia tidak mati sebagai masa lalu semata, tetapi dapat tetap hidup, menginspirasi, dan selalu relevan dengan kebutuhan serta perubahan zaman.

Penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, berdasarkan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, memang sangat layak dipahami oleh semua lapisan masyarakat DIY, khususnya generasi milenial. Sebab, banyak nilai yang sangat layak dipelajari dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, makna Serangan Umum 1 Maret 1949 perlu terus digali dan disosialisasikan, seperti dilakukan Rabu (30/3) lalu, melalui berbagai media, forum, dan aktivitas. □

Sentralisasi dan Desentralisasi Pengelolaan Sampah

Chandra W. Purnomo

ISU akan ditutupnya TPA Piyungan menyebabkan banyak pihak mulai memikirkan alternatif pola pengelolaan sampah yang tidak bergantung lagi pada TPA, sehingga muncul berbagai gerakan seperti "Sampah Selesai di Sumber", atau "Desa Mandiri Sampah". Tentunya semangat mengelola sampah dari tingkat bawah sangat perlu diapresiasi dan didukung. Sama halnya dengan mengolah bahan lain, mengolah sampah harus dijalankan dengan tepat supaya efektif dan minim risiko.

Partisipasi masyarakat sangat ditekankan dalam UU Pengelolaan Sampah (UU 18/2008). Misal kegiatan pengumpulan sampah ke fasilitas antara yang dimiliki pemerintah seperti TPS/TPS3R/Depo menjadi tanggung jawab warga. Kemudian dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Perpres 97/2017), upaya pengurangan timbulan sampah sebesar 30% ditumpukan pada upaya daur ulang dan pembatasan sampah di level masyarakat. Hal ini berbeda dengan pengelolaan sampah di sisi hulu di berbagai negara maju yang hanya mewajibkan pemilahan dan pewadahan saja kepada warganya sebelum dijemput oleh armada pengangkut sampah dari rumah ke rumah.

Sistem pengelolaan yang mengharuskan seratus persen sampah selesai di level masyarakat berpotensi menimbulkan masalah baru yang tidak kalah pelik. Sejarah persampahan dunia telah mencatat pada era 1940an di kota Los Angeles (LA) Amerika Serikat, dahulu sampah dihabiskan dari sumbernya dengan tungku pembakar yang diletakkan di halaman tiap rumah (*backyard incinerator*). Asap dari tungku bakar sampah yang jumlahnya sangat banyak itu menyebabkan sering terjadinya kabut asap beracun (*smog*) yang sangat mengganggu kesehatan warga kota. Akhirnya, praktek pembakaran sampah di kota LA dilarang total pada tahun 1957 dan digantikan dengan sistem pengambilan sampah dari rumah ke rumah (Holland, 2014).

Untuk itu perlu diformulasikan kebijakan pengelolaan sampah yang partisipatif tapi tetap mengedepankan keamanan dan keselamatan. Metode SANDO (sentralisasi pengelolaan sampah anorganik, desentralisasi pengelolaan sampah organik) diharapkan mampu menggabungkan partisipasi masya-

rakat dan juga peran pemerintah sebagai penanggung jawab utama masalah persampahan secara proporsional.

Sampah organik merupakan penyumbang timbulan sampah terbesar dan dapat didesentralisasikan pengelolaannya kepada masyarakat jika memungkinkan. Sampah organik sebenarnya menjadi beban terbesar dari sistem persampahan kita dan menyumbang 60% lebih dari total timbulan sampah



KR-JOKO SANTOSO

tiap harinya. Di TPA, sampah organik menjadi sumber masalah karena akan menghasilkan gas rumah kaca (gas metana), air lindi, mempercepat umur pakai dan juga memicu perusakan ilegal. Sehingga sangat tepat jika sampah organik diupayakan jangan sampai masuk ke TPA dengan sebisanya mungkin dihabiskan di sumber. Teknologi pengolahan sampah organik umumnya juga sederhana seperti komposting, alat hitam (BSF), biopori, eko-enzim dan lain sebagainya.

Meski dapat memakai teknologi sederhana dan tepat guna, masyarakat tetap membutuhkan dukungan dan pendampingan dalam mengelola sampah organik. Pengomposan misalnya, membutuhkan suhu yang tepat agar kompos dapat matang dan berkualitas. Metode BSF juga perlu dikendalikan agar alat tidak mengganggu lebah madu yang

penting untuk penyerbukan. Terlebih lagi untuk kawasan khusus yang tidak memiliki lahan pekarangan seperti rusun dan juga penghasil sampah organik besar seperti pasar dan hotel memerlukan fasilitas terpisah yang harus dipikirkan manajemen.

Akan sangat sulit jika seluruh sampah termasuk anorganik (yang tidak laku jual) seperti berbagai jenis plastik, kain, karet, kaca dan juga termasuk sampah spesifik seperti baterai dan bola lampu bekas, obat kadaluarsa, popok sekali pakai dan APD bekas harus dapat dimusnahkan di level masyarakat. Selain belum banyak teknologi pemusnahan yang aman untuk skala kecil tentunya potensi bahaya seperti gas dioksin/furan, mikroplastik, paparan patogen dan logam berat akan sulit dihindari dan berpotensi tersebar luas. Kalaupun masyarakat mampu membeli alat pemusnah sampah anorganik sistem termal perlu dipikirkan juga bagaimana monitoring dan perbaikan alat jika bermasalah.

Sudah seharusnya pemerintah berkewajiban mengumpulkan dan mengolah sampah anorganik dan spesifik ini dengan membangun fasilitas pengolahan skala besar, dengan teknologi yang mapan dan ramah lingkungan, sehingga masyarakat dapat fokus pada pemilahan dan pewadahan saja tanpa risau memikirkan pengolahannya. Jika sampah sudah terpilih dari sumber maka pemrosesan lanjut menjadi RDF (*Refuse Derived Fuel*) misalnya akan jauh lebih mudah karena tidak memerlukan sistem pendinginan yang lama dan memakan biaya besar. Selain diolah, sampah terpilih yang terkumpul dalam kuantitas besar dapat dengan mudah disalurkan kembali ke masing-masing produsernya (EPR). □

*) Chandra W Purnomo. Dosen Fakultas Teknik UGM.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Transformasi Desa Wisata

Wahjudi Djaja

YOGYAKARTA khususnya Sleman dikenal sebagai pionir dalam pengembangan pariwisata berbasis alam pedesaan. Sleman pernah menjadi rujukan tentang pengembangan desa wisata. Doto Yogantoro, salah satu Arsitek Desa Wisata Indonesia, dengan desa wisata Pentingsari, berhasil menjadi percontohan dengan segudang peran dan prestasi, nasional maupun internasional. Upayanya mengemas dan mengangkat potensi desa menjadi produk wisata ditiru dan dikembangkan daerah lain sehingga muncul desa-desa wisata baru.

Namun belum semua desa wisata bisa segera bangkit selepas badai Corona yang menjadikan desa wisata mati suri. Beragam upaya dilakukan Dinas Pariwisata Sleman maupun Kemenparekraf untuk mengangkat kembali peran desa wisata. Mulai reaktivasi, penguatan sampai *recovery* dilakukan dengan beragam skema. Berbagai even dan festival digelar untuk menarik kunjungan wisatawan. Sejauh ini upaya tersebut belum begitu berdampak untuk mengangkat kembali keberadaan desa wisata sekaligus mengembalikan kejayaannya. Selain karena semakin banyaknya destinasi wisata yang bisa dijadikan pilihan, lemahnya kelembagaan, dan merebaknya budaya latah terkait pembuatan paket wisata, permasalahan nampaknya terletak pada kemampuan pengelola desa wisata untuk melakukan transformasi.

Dinamika pariwisata cepat berubah seiring majunya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Beragam layanan dan aplikasi bisa dengan cepat mengantarkan wisatawan ke satu titik yang dikehendaki, baik menyangkut transportasi, destinasi maupun kuliner. Karena itu, kondisi ini harus segera direspons oleh para pengelola desa wisata. Mereka harus selalu jeli, kreatif dan cepat dalam mengubah potensi desa dan produk budaya menjadi produk pariwisata yang diminati wisatawan.

Ada tiga strategi yang bisa dilakukan untuk menggerakkan kembali dinamika pari-

wisata. Pertama inovasi, yakni kemampuan dan keberanian melakukan terobosan terkait layanan dan produk pariwisata. Pengelola desa wisata perlu mengeksplorasi kembali, kuliner, adat tradisi dan kearifan lokal untuk dijadikan karakter desa wisata. Kedua, adaptasi, yakni kemampuan menyesuaikan diri dengan dinamika zaman. Pandemi menyadarkan kita bahwa yang bisa bertahan bukan yang besar dan kuat, tetapi yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri. Ketiga, kolaborasi, yakni kesiediaan untuk berjejaring untuk sama-sama mengangkat potensi wisata menjadi andalan dan unggulan. Teknologi menjadi jembatan penting untuk membangun sinergi agar desa wisata tetap eksis dalam peraturan wisata nasional.

Terkait kolaborasi perlu ada perhatian khusus menyangkut keberadaan Pokdarwis dan Bumdes (Bumkal). Kedua lembaga desa ini perlu segera membangun sinergi menguatkan dalam memberdayakan dan mengelola potensi desa menjadi aset wisata bersama. Di beberapa kalurahan sudah terdengar keduanya "saling serobot" dalam hal bisnis pariwisata. Sebagai pemegang kuasa pemerintahan, Lurah perlu segera membuat payung hukum dalam bentuk peraturan kalurahan yang mengatur kerjasama dan pembagian kewenangan antara Pokdarwis dan Bumkal agar sama-sama berperan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui aktifitas pariwisata. Di lain pihak OPD yang terkait dengan pemberdayaan potensi desa perlu merancang program pembangunan yang integral dan holistik. Hal ini penting selain demi efektifitas dan efisiensi anggaran juga agar ekosistem desa tidak rusak karena

beragam program masuk desa tanpa yang terpadu. Apalagi dalam konteks keistimewaan Yogyakarta, desa merupakan pilar utama yang menopang kehidupan mayoritas warganya. Sudah saatnya pemerintah kalurahan golang bersama Bumkal dan Pokdarwis untuk mendukung program keistimewaan berbasis budaya desa.

Pariwisata sudah dideklarasikan sebagai lokomotif penggerak perekonomian nasional. Selain harus diimbangi dengan revitalisasi produk wisata dan rebranding desa wisata, yang tak kalah pentingnya adalah mengubah mentalitas pengelola wisata menjadi seorang transformator yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Pokdarwis dan Bumkal perlu segera bertemu menyamakan visi dan langkah agar segera bisa mengambil peluang. Merekalah garda terdepan dalam upaya mengangkat perekonomian masyarakat pasca pandemi melalui sektor pariwisata. □

*) Wahjudi Djaja SS MPd (Dosen STIE Pariwisata API Yogyakarta, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY & Anggota BPPS).

Pojok KR

Pemda DIY resmi memulai operasional otoped atau skuter listrik di Kota Yogyakarta.

-- Dilarang!

PSS Sleman akhirnya mampu bertahan di Kompetisi PSSI Liga 1 tahun depan.

-- Terus bertahan.

Kemenag menyampaikan, awal puasa Ramadan 1443 H ada potensi perbedaan. -- Tetap bersatu.

Beraksi

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Derita Pembelajaran Daring di Bantul

AKHIRNYA pemerintah mulai membolehkan Pelajaran Tatap Muka (PTM), meski ada yang belum total, masih pembelajaran yang terbatas mengingat Pandemi Covid-19 belum berakhir. Karena sudah lama merindukan hal tersebut. Sebab sejumlah siswa di Bantul yang terdampak, banyak yang berasal dari wilayah pegunungan dengan medan naik turun, se-

hingga siswa sangat kesulitan sinyal ketika pelajaran daring. Mereka yang dari kalangan menengah ke bawah, dengan kondisi ekonomi yang sulit, pelajaran mealui sistem daring ini menambah beban. Karena itu, mudah-mudahan PTM total segera dilaksanakan dan murid kembali ceria. □

*) Siti Rofingah, MTsN b3 Bantul.

Angkutan Darat, Saatnya Cek Kondisi Kendaraan

MESKIPUN kira-kira masih sebeluma lagi 'tradisi mudik' mulai berjalan, namun sudah bisa diduga arus piulang kampung akan besar. Ini mengingat 2 kali mudik tahun lalu semua serba terbatas dan sembunyi-sembunyi. Karena itu, saatnya para pengusaha angkutan daerah berbenah.

Setelah mengalami paceklik, karena jarang digunakan, maka

sekarang waktu mereka untuk bekerja. Karena itu harus di cek, rem, ban dan semuanya termasuk yang utama yakni mesin. Sebab ini yang berpotensi perjalanan menjadi terganggu. Yuk kita jalan mudik dengan aman dan nyaman. □

*) Ir Sukoyo Raharjo, Karangploso, Maguwoharjo, Sleman

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wirmon (1912 - 1984).

Penerbit: Drs H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budiarto, Mussahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwati, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afianti, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklikankryk23@yahoo.com, iklikankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Pewakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharjo.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lempersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Suniyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.